

PERAN UKM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KARAWANG

(Studi Kasus pada Dinas Koperasi UKM Karawang)

Mochammad Rouf^{1*}, Dini Yani², Puji Isyanto³

^{1,2,3}Universitas Buana Perjuangan Karawang

Corresponding Author: mn20.mochammadrouf@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Article History

Received : 20-07-2023

Revised : 30-07-2023

Accepted : 03-08-2023

Kata Kunci: Masyarakat; Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM); Pemerintah

Keywords: Empowerment of Small And Medium Enterprises (UKM); Government; Society

ABSTRAK

Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karawang. Peranan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada UKM di Kabupaten Karawang yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang diharapkan untuk mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang melakukan pendataan terhadap semua UKM yang ada di Kabupaten Karawang.

ABSTRACT

The role of the Office of Cooperatives and SMEs in the Empowerment of Small and Medium Enterprises in Karawang Regency. One of the roles of the Office of Cooperatives and UKM s in Karawang Regency is to empower UKM in Karawang Regency which has been stated in the RENSTRA of the Karawang Regency Office of Cooperatives and SMEs. The efforts made by the Office of Cooperatives and UKM Karawang Regency are expected to encourage the realization of UKM as an economic force that can improve people's welfare. The purpose of this research is to know and describe the implementation of UKM empowerment and its supporting and inhibiting factors. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research problem is (1) the implementation of UKM empowerment (2)

supporting factors and inhibiting factors. The result of this research is that empowerment is not maximized and evenly distributed because the data on the number of SMEs is not yet valid with its supporting and inhibiting factors. The advice given is that the Office of Cooperatives and UKM in Karawang Regency collects data on all UKM in Karawang Regency.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara adalah pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah harus berjalan dengan semestinya. Rasyid (2018) menyampaikan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi yang hakiki, yaitu: fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Ketiga fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dalam negara berkembang yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan nasional suatu negara, begitu juga dengan negara kita yakni Indonesia. Dalam pembangunan nasional di Indonesia, bidang ekonomi adalah salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam pembangunan nasional saat ini Pemerintah Daerah berperan penting dalam bidang ekonomi, bukan hanya pemerintah pusat saja.

Ekonomi berjalan akibat adanya sistem, dimana suatu sistem ekonomi merupakan sekumpulan institusi ekonomi yang memiliki keteraturan, dimana setiap institusi ekonomi tersebut bersifat saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan bersama dalam perekonomian. Dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang memiliki kewenangan yang besar dalam meningkatkan potensi daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perlu dilakukan berbagai macam upaya oleh pemerintah daerah yang lebih kreatif dan inovatif. (Drs. H. Mudji Rahardjo, 2018)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No. 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Dinas koperasi dan UKM kabupaten Karawang Jl Kertaumi no. 31, Berbagai transaksi mengenai aktifitas ekonomi dilakukan oleh UKM ini, mulai dari kegiatan produksi, distribusi dan pengelolaan dana yang kemudian itu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga peneliti tergugah untuk mengangkat judul “Peran UKM dalam upaya meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat kabupaten karawang”.

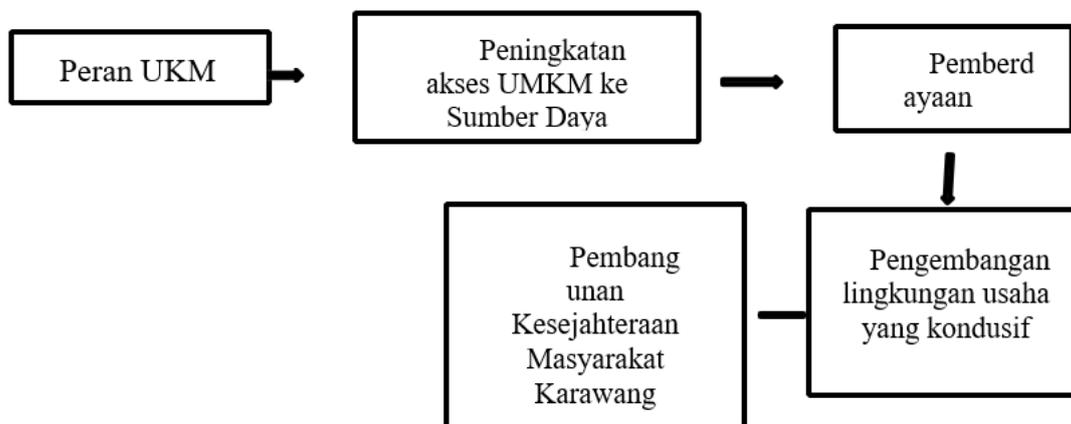
Pengertian Peranan Menurut Soekanto (Srijani 2020) peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Menurut Siagian (Wardani et al. 2016) menyatakan bahwa peranan penting pemerintah terlibat dalam lima wujud utama, yaitu pertama, selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif. Kedua, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Ketiga selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang modern. Keempat, selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Kelima, selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan.

Peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara spesifik menurut Tambunan (2002, h.146) adalah pertama, Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat. Kedua, formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga, koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program, dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUKM. Keempat, Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUKM. Kelima, Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Hipotesis

- Ha: Adanya hubungan peran UKM dalam upaya meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat karawang
- Ho: Tidak Adanya hubungan peran UKM dalam upaya meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.
 Jumlah responden yang diambil berjumlah 31 responden.

Tabel 1. Variabel Responden

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Peran UKM	Program Pemerintah	Bantuan	Ordinal
Kesejahteraan		Pendapatan	Nominal

Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu sebagian masyarakat yang datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang.

Sampel pada penelitian ini yaitu sebagian masyarakat yang datang ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling* atau Penyampelan acak sederhana.

Dalam observasi ini peneliti mengamati bagaimana observasi dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung di tempat dan menyebarkan kuesioner.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.

Tabel 2. Uji Validitas X1.1

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid CB	1	3.2	5.0	5.0
B	10	32.3	50.0	55.0
SB	9	29.0	45.0	100.0
Total	20	64.5	100.0	
Missing System	11	35.5		
Total	31	100.0		

Soal 1 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban cukup baik ada 1 orang, Baik ada 10 orang dan Sangat Baik ada 9 orang.

Tabel 3. Uji Validitas X1.2

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TB	1	3.2	3.3	3.3
CB	7	22.6	23.3	26.7
B	12	38.7	40.0	66.7
SB	10	32.3	33.3	100.0
Total	30	96.8	100.0	
Missing System	1	3.2		
Total	31	100.0		

Soal 2 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban Tidak baik ada 1 orang, cukup Baik ada 7 orang, Baik ada 12 orang dan Sangat Baik ada 10 orang.

Tabel 4. Uji Validitas X1.3

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid CB	7	22.6	23.3	23.3
B	14	45.2	46.7	70.0
SB	9	29.0	30.0	100.0
Total	30	96.8	100.0	
Missing System	1	3.2		
Total	31	100.0		

Soal 3 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban cukup baik ada 3 orang, Baik ada 14 orang dan Sangat Baik ada 9 orang.

Tabel 5. Uji Validitas X1.4

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STB	1	3.2	3.3	3.3
CB	4	12.9	13.3	16.7
Valid B	16	51.6	53.3	70.0
SB	9	29.0	30.0	100.0
Total	30	96.8	100.0	
Missing System	1	3.2		
Total	31	100.0		

Soal 4 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban Sangat Tidak baik ada 1 orang, cukup Baik ada 4 orang, Baik ada 16 orang dan Sangat Baik ada 9 orang.

Tabel 6. Uji Validitas X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CB	9	29.0	30.0	30.0
Valid B	12	38.7	40.0	70.0
SB	9	29.0	30.0	100.0
Total	30	96.8	100.0	
Missing System	1	3.2		
Total	31	100.0		

Soal 5 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban cukup baik ada 9 orang, Baik ada 12 orang dan Sangat Baik ada 9 orang.

Tabel 7. Uji Validitas X1.6

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STB	1	3.2	3.3	3.3
CB	5	16.1	16.7	20.0
Valid B	14	45.2	46.7	66.7
SB	10	32.3	33.3	100.0
Total	30	96.8	100.0	
Missing System	1	3.2		
Total	31	100.0		

Soal 6 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban Sangat Tidak baik ada 1 orang, cukup Baik ada 5 orang, Baik ada 14 orang dan Sangat Baik ada 10 orang.

Tabel 8. Uji Validitas X1.7

X1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CB	12	38.7	40.0
	B	8	25.8	66.7
	SB	10	32.3	100.0
	Total	30	96.8	100.0
Missing	System	1	3.2	
Total		31	100.0	

Soal 7 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban cukup baik ada 12 orang, Baik ada 8 orang dan Sangat Baik ada 10 orang.

Tabel 9. Uji Validitas X1.8

X1.8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CB	10	32.3	33.3
	B	6	19.4	53.3
	SB	14	45.2	100.0
	Total	30	96.8	100.0
Missing	System	1	3.2	
Total		31	100.0	

Soal 8 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban cukup baik ada 10 orang, Baik ada 6 orang dan Sangat Baik ada 14 orang.

Tabel 10. Uji Validitas X1.9

X1.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	CB	5	16.1	16.7
	B	13	41.9	60.0
	SB	12	38.7	100.0
	Total	30	96.8	100.0
Missing	System	1	3.2	
Total		31	100.0	

Soal 9 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban cukup baik ada 5 orang, Baik ada 13 orang dan Sangat Baik ada 12 orang.

Tabel 11. Uji Validitas X1.10

		X1.10			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STB	1	3.2	3.3	3.3
	CB	1	3.2	3.3	6.7
	B	22	71.0	73.3	80.0
	SB	6	19.4	20.0	100.0
	Total	30	96.8	100.0	
Missing	System	1	3.2		
Total		31	100.0		

Soal 10 ada 31 yang menjawab dimana untuk jawaban Sangat Tidak baik ada 1 orang, cukup Baik ada 1 orang, Baik ada 22 orang dan Sangat Baik ada 6 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat peran UKM yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, maka pemerintah daerah Kabupaten Karawang khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang selaku SKPD berwenang melakukan pemberdayaan terhadap UKM Kabupaten Karawang sehingga UKM mampu bertahan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan besar.

Pelaksanaan pemberdayaan UKM yang upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang Dalam pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang melakukan berbagai upaya, antara lain: pertama, pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan berupa pelatihan-pelatihan terhadap UKM seperti pelatihan peningkatan fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelatihan tersebut tentang prosedur kepengurusan hak paten, hak merek, legalitas usaha, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. bahwa proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penguatan dan penyokongan. Pemerintah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka, serta memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu bertahan agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang memberikan penguatan dan penyokongan kepada pelaku UKM melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya bagi pelaku industri kecil agar mampu bertahan dan usahanya lebih berkembang.

Faktor pendukung dan faktor penghambat proses pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan UKM adalah pertama, adanya struktur yang terintegrasi. Dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan telah mendukung keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan UKM Kabupaten Karawang. Peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik salah satunya adalah implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang merupakan badan (Srijani 2020) pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan, elaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan UKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang masih belum berjalan maksimal dan merata. Hal tersebut dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang tidak mempunyai data yang valid mengenai jumlah seluruh UKM di Kabupaten Karawang. Serta tidak hanya dari Pemerintah saja melainkan partisipasi dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah dapat membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi dari masyarakat memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Christofer, Ondang. 2019. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)." *Jurnal Eksekutif* 3(3): 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/25488>.
- Irawan, Paulus Lucky Tirma, Kestrilia Rega Prilianti, and Melany. 2020. "Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Implementasi E-Commerce Di Kelurahan Tlogomas." *Jurnal SOLMA* 9(1): 33–44.
- Lamazi, Lamazi et al. 2020. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1(2): 157–72. <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39%0Ahttps://jurnal.uhnp.ac.id/wippon/article/view/227>.
- Purnamasari, Hanny, and Rachmat Ramdani. 2020. "Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Meningkatkan Kualitas SDM

- Pelaku Koperasi Dan UMKM Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 5(1): 85–98.
- Putra, Adnan Husada. 2018. “Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 5(2).
- Rifa’i, Bachtiar. 2013. “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.” *Journal Unair* 1(1): 1–7.
- Srijani, Kadeni, Ninik. 2020. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8(2): 191.
- Wahyuningsih, Sri. 2009. “Sri Wahyuningsih Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia.” *Mediagro* 5(1): 1–14.
- Wardani, Hesti Kusuma, Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, and Abdullah Said. 2016. “Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1(2): 213–20.